



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2015**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Fakultas dan Ekonomi Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Syariah
Sebagai Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi*

**NOVRIANTI
12 231 056**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH / AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR**

2017

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : NOVRIANTI
NIM : 12 231 056
Tempat / Tanggal Lahir : Sitiung/ 08 November 1993
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2015 "** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat, kecuali dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Februari 2017
Saya yang menyatakan



NOVRIANTI
NIM. 12 231 056

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama NOVRIANTI, NIM 12 231 056 dengan judul: "ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2015", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, Februari 2017

Pembimbing I

Nasfizar Guspendri, SE., M.Si.
NIP 19750823 200312 1 004

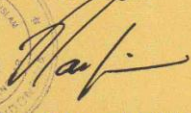
Pembimbing II

Sri Adella Fitri, SE., M.Si.
NIP 19830713 200604 2 002

Mengetahui:





Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri
Batusangkar




Nasfizar Guspendri, SE., M.Si.
NIP 19750823 200312 1 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh **NOVRIANTI NIM 12 231 056** berjudul "**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015**", telah diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Strata Satu (S1).

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Nasfizar Guspendri, SE., M.Si NIP. 19750823 200312 1 004	Ketua Sidang		02/17
2	Sri Adella Fitri, SE., M.Si. NIP. 19830713 200604 2 002	Sekretaris Sidang		03/17
3	Khairul Marlin, SE., M.Kom., MM. NIP. -	Anggota I		01/17
4	Desy Farina, SE., M.Si. NIP. -	Anggota II		27/17

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri
Batusangkar



Nasfizar Guspendri, SE., M.Si
NIP. 19750823 200312 1 004

ABSTRAK

Novrianti, Nim **12 231 056**, dengan judul skripsi “**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2015**”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Kosentrasi Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar 2017.

Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2015 dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, dan rasio efisiensi belanja. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, dan rasio efisiensi belanja.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kuantitatif. Sumber penelitian adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Analisis data yang penulis gunakan adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, dan rasio efisiensi belanja.

Hasil dari analisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang telah penulis lakukan berdasarkan analisis kinerja keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 7,70% berarti ketergantungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sangat tinggi terhadap bantuan dari Pemerintah Pusat, provinsi dan lainnya sehingga tingkat kemandirian daerah rendah sekali. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dilihat dari rasio efektifitas pendapatan asli daerah efektif sebesar 83,67% dengan kategori kurang efektif. Rasio efisiensi PAD dapat dikatakan efisiensi sebesar 2,36% dengan kategori sangat efisien. Rasio belanja langsung sebesar 51,61% dan rasio belanja tidak langsung sebesar 48,38% dapat dikatakan baik. Dan rasio efisiensi belanja sebesar 94,28% secara umum dapat dikatakan baik.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian, Efektifitas PAD, Efisiensi PAD, Rasio Aktivitas, Rasio Efisiensi Belanja.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2015”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah pada Jurusan Ekonomi Syariah Kosentrasi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Selanjutnya shalawat beserta salam, semoga tercurah buat junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan bekal bagi umatnya yaitu Al-Qur’an dan Sunnah sebagai pedoman hidup dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam penyelesaian Skripsi ini tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak dengan ikhlas membantu penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis Rahimin (ayah) dan Darniati (ibu) serta saudara-saudaraku (Sri Yulia Ariati, Ulfatmi, Elfira, Despita Dewi, dan Hilda Novsilawati). Dan seterusnya ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Kasmuri, MA., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
2. Bapak Nasfizar Guspendri, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
3. Bapak Gampito, SE.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah sekaligus Pembimbing Akademik.

4. Bapak Nasfizar Guspendri, SE., M.Si selaku pembimbing I dan Ibuk Sri Adella Fitri, SE., M.Si selaku pembimbing II yang berhasil membimbing penyelesaian Skripsi, menasehati dengan penuh kesabaran memberikan petunjuk dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Khairul Marlin, SE.,MM.,M.Kom selaku penguji I.
6. Bapak, Ibuk Dosen dan Staf Administrasi IAIN Batusangkar yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis yang terus akan bermanfaat dalam kehidupan penulis kedepannya.
7. Kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Dharmasraya beserta seluruh Karyawan/ karyawan yang telah bersedia memberikan izin penelitian kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
8. Sahabat tersayang miftahul fadhilla, rahma daniati, Rohmi Kurnia Kasih dan yang selalu menemani, mendukung dan memberi semangat selama perkuliahan ini.
9. Keponakan penulis yang selalu menjadi semangat supaya tetap berjuang yaitu Ollin, Keysia, Aisyah, Gilang, Viona, dan Kenzo.
10. Keluarga besar Ekonomi Syariah yang telah memberi masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini..

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka semua dan menjadi amal ibadah disisi-Nya. Amin.

Batusangkar, Februari 2017
Penulis,

NOVRIANTI
12 231 056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akuntansi Sektor Publik	
1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik.....	9
2. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik.....	10
3. Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik.....	11
B. Laporan Keuangan Daerah	
1. Pengertian Laporan Keuangan.....	12
2. Jenis Laporan Keuangan.....	12
3. Pemerintahan Daerah.....	15
4. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	16
5. Akuntansi Keuangan Daerah.....	17

C. Laporan Realisasi Anggaran	
1. Pengertian Laporan Realisasi Anggaran.....	18
2. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran.....	20
D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	
1. Pengertian APBD.....	20
2. Fungsi APBD.....	21
3. Proses Penyusunan dan Penetapan APBD.....	22
4. Klasifikasi APBD.....	23
E. Pengukuran Kinerja Sektor Publik	
1. Pengertian Kinerja dan Pengukuran kinerja.....	26
2. Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja.....	28
3. Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik.....	28
F. Teknik Analisis Rasio Keuangan	
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	29
2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah.....	30
3. Rasio Aktifitas.....	30
4. Rasio Efisiensi Belanja.....	31
G. Penelitian Relevan.....	32
H. Defenisi Operasional.....	33
I. Kerangka Berpikir.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	36
C. Sumber Data.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Teknik Analisis Data	
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	37
2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah.....	38
3. Rasio Aktifitas.....	40
4. Rasio Efisien Belanja.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Instansi	44
1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Dharmasraya	44
2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Dharmasraya	44
3. Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Dharmasraya	46
B. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya	54
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	54
2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah	56
3. Rasio Aktifitas	59
4. Rasio Efesien Belanja	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	64

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran APBD Pemerintah Kab. Dharmasraya tahun 2015	4
Tabel 3.1 Kemampuan Keuangan, Rasio Kemandirian.....	37
Tabel 3.2 Rasio Efektifitas	38
Tabel 3.3 Rasio Efisiensi.....	39
Tabel 3.4 Rasio Keuangan, Rasio Kemandirian.....	41
Tabel 3.5 Rasio Efektifitas.....	42
Tabel 3.6 Rasio Efisiensi.....	42
Tabel 4.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	54
Tabel 4.2 Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman.....	54
Tabel 4.3 Perhitungan Rasio Efektifitas PAD	56
Tabel 4.4 Rasio Efektifitas.....	57
Tabel 4.5 Biaya Perolehan PAD.....	58
Tabel 4.6 Pendapatan Asli Daerah.....	58
Tabel 4.7 Rasio Efisiensi	59
Tabel 4.8 Belanja Langsung Pemerintah Kab. Dharmasraya.....	60
Tabel 4.9 Belanja Tidak Langsung.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir.....	35
Gambar 4.1	Struktur Organisasi DPPKAD.....	47

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi sektor publik merupakan yang menjalankan roda pemerintah yang diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, harus memiliki manfaat bagi publik. Oleh karena itu kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangi dengan terwujudnya pemerintah yang bersih dan bertanggungjawab.

Orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik.¹

Berkaitan dengan dasar-dasar pemerintahan yang baik, jujur, adil, dan transparan, dalam firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 58:²

﴿إِن يَأْتِ الْعَدْلَ تَحْكُمُوا أَن النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلُهَا إِلَىٰ آلَاءٍ مِّنْتِ تَوَدُّوْا أَن يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
﴿صَبْرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعْظُمُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”.

Berdasarkan ayat di atas, sebuah riwayat yang menceritakan tentang memberikan amanat dan hak kepada yang berhak serta menghukum dengan adil. Apabila dia seorang kepala negara, maka rakyat yang diperintahnya merupakan amanat Allah. Maka, dia wajib memerintah rakyatnya dengan berdasarkan undang-undang (hukum) Allah dan hendaklah dia selalu mengikuti perintah Allah. Mengambil petunjuk sunnah Nabi, tidak menyerahkan suatu tugas (urusan) kepada mereka yang

¹Muindro Renyowijoy, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2008), hal. 19

²Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy, Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), hal. 69

bukan ahlinya (tidak punya kemampuan dan kemauan), tidak merampas sesuatu hak dari rakyat, tidak menipu dan berbuat curang kepada seorang muslim, tidak menerima suap, tidak memakan harta manusia dengan jalan batil seperti korupsi dan penggelapan. Sebaliknya, dia terus menerus menggunakan waktunya untuk kemaslahatan (kesejahteraan) rakyat.³

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.⁴ Pemerintah Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemda dan DPRD).⁵

Analisis keuangan sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting disamping informasi lain seperti informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen dan lainnya. Komponen-komponen laporan keuangan yaitu:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan⁶

Dalam SAP yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010 ada beberapa pernyataan salah satunya adalah Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang

³Tengku Muhammad Hasbi ash-shiddieqy, *Tafsir An-Nur*, (Jakarta, Cakrawala Publishing, 2011), hal. 547

⁴Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor...*, hal. 211

⁵Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor...*, hal. 215

⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,(Bandung : fokusindo Mandiri, 2013),hal. 242

sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Jika dibandingkan dengan neraca LRA menduduki prioritas yang lebih penting dan LRA ini merupakan jenis laporan keuangan daerah yang dahulu dihasilkan sebelum membuat laporan neraca dan laporan arus kas.

Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung (*backbone*) penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama. Berdasarkan LRA tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja, dan analisis pembiayaan. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode sekaligus mengungkapkan kegiatan keuangan SKPD yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.⁷

Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian.⁸ Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan belanja daerah yang telah digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kemandirian keuangan daerah, mengukur efektifitas dan efisiensi, mengukur aktivitas pemerintah daerah, kontribusi sumber pendapatan daerah, dan melihat pertumbuhan atau perkembangan

⁷Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit & Percetakan STIM, 2010), hal. 135

⁸Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), Hal. 58

pendapatan. Dalam anggaran berbasis kinerja secara strukturnya meliputi anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.⁹

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu daerah yang otonom sehingga pemerintahan daerah harus membuat laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan dan dijadikan sebagai hasil kinerja keuangan pemerintahan. Berikut data keuangan Kabupaten Dharmasraya Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja tahun 2015.

Tabel 1.1
Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintahan
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2015 (Dalam Rupiah)

Tahun	Keterangan	Anggaran	Realisasi
2015	Pendapatan Asli Daerah	67.755.812.750,00	56.694.339.206,00
	Total Pendapatan Transfer	610.924.435.830,00	604.520.411.648,00
	Belanja Operasi	530.661.310.123,00	504.823.199.359,00
	Belanja Modal	267.253.302.198,00	247.439.575.452,10

Sumber : LRA Kabupaten Dharmasraya

Dilihat dari tabel di atas PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Dharmasraya tahun 2015 tidak mencapai target yang di anggarakan. Pada tahun 2015 Kabupaten Dharmasraya hanya mampu merealisasikan pendapatan asli daerah sebesar 83,67%. Pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya memiliki pendapatan asli daerah yang masih kecil sehingga sangat ketergantungan yang cukup besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat yang terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus untuk belanja daerah, baik dalam pembiayaan pembangunan, belanja rutin dan dalam hal lainnya. Disebabkan karena pendapatan dari pajak daerah kecil dari yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 10.643.026.951,00.

⁹Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...*, Hal. 121

Sedangkan belanja operasi tahun 2015 pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat menghemat dari yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 530.661.310.123,00 dan yang terealisasi sebesar Rp 504.823.199,359,00 ini disebabkan karena belanja pegawai nya kecil dari yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 333.129.415.085,00. Belanja modal pemerintahan Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2015 kecil dari yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 247.439.575.452,10. Disebabkan karena belanja jalan, irigasi dan jaringan yang terealisasi sebesar Rp 175.566.208.982,00.

Pendapatan asli daerah yang masih kecil sedangkan pendapatan transfer pusat, belanja operasi dan belanja modal yang besar. Dilihat dari kasat mata Kabupaten Dharmasraya bisa menghasilkan sumber Pendapatan Asli Daerah dengan tinggi karena memiliki hasil sumber daya alam yang tinggi seperti kebun sawit, kebun karet, kebun coklat dan tambang emas, untuk mengurangi sumber dana dari pihak pusat, untuk itu diperlukan perbaikan kinerja terhadap pendapatan asli daerah, yang dikelola oleh dinas pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah (DPPKAD) Kabupaten Dharmasraya, agar mampu memberikan hasil yang maksimal dari penerimaan pendapatan asli daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya serta bisa melakukan pembiayaan terhadap belanja daerah sehingga otonomi daerah bisa terlaksana secara maksimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pencapaian target pendapatan dan belanja Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya tahun 2015
2. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2015.
3. Pertumbuhan pendapatan dan belanja pemerintahan daerah kabupaten Dharmasraya tahun 2015.
4. Masih besarnya dana transfer pusat dari pendapatan asli daerah.
5. Rendahnya realisasi pendapatan asli daerah dari target yang dianggarkan.
6. Rendahnya realisasi belanja operasi dari target yang dianggarkan.
7. Rendahnya realisasi belanja modal dari target yang dianggarkan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dibatasi masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana rasio kemandirian keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintahan kabupaten dharmasraya tahun 2015?
2. Bagaimana rasio efektifitas dan efesieni pendapata asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dharmasraya tahun 2015?
3. Bagaimana rasio aktivitas terhadap kinerja keuangan pemerintahan kabupaten Dharmasraya tahun 2015?
4. Bagaimana rasio efesisiensi belanja terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten Dharmasraya tahun 2015?

D. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2015 dengan menggunakan rasio-rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas dan efisiensi PAD, rasio aktivitas dan rasio efisiensi belanja?

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin penulis capai adalah:

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintahan Kabupaten Dharmasraya berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2015.
2. Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintahan Kabupaten Dharmasraya berdasarkan rasio efektifitas dan efisien PAD tahun 2015.
3. Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintahan Kabupaten Dharmasraya berdasarkan rasio aktivitas tahun 2015.
4. Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintahan Kabupaten Dharmasraya berdasarkan rasio efisiensi belanja tahun 2015.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan baik secara teori maupun praktek. Selain itu sebagai syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi syariah Program Studi Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Batusangkar.

2. Bagi Pemerintah

Bagi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, sebagai masukan yang berguna untuk bahan pertimbangan di masa yang akan datang

dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

3. Bagi Pihak-pihak lain

Hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat dijadikan bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada serta dapat menambah sumber informasi untuk penelitian pada waktu yang mendatang, yang memiliki topik yang sama sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi.

BAB II

LANDASAN TEORITIK

A. Akuntansi Sektor Publik

1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Istilah “Sektor Publik” sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Akuntansi Sektor Publik yaitu mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik & swasta. Akuntansi Sektor Publik merupakan bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintahan daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi non profit lainnya.¹⁰

Akuntansi Sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik. Organisasi sektor publik menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial dan manfaatnya bagi publik, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan.¹¹

¹⁰Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 15

¹¹Muindro Renjowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008), hal. 2

2. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Adapun karakteristik Akuntansi Sektor Publik adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

Untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani.

2. Aktivitas

Pelayanan publik (*publik services*) seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik dan penyediaan pangan.

3. Sumber Pembiayaan

Berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku.

4. Pola Pertanggungjawaban

Bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

5. Kultur Organisasi

Bersifat birokratis, formal dan berjenjang.

6. Penyusunan Anggaran

Dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Penurunan program publik dalam anggaran dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat dan akhirnya disahkan oleh wakil dari masyarakat di DPR, DPD dan DPRD.¹²

¹²Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2009), hal. 8-9

3. Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur dari posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Tujuan umum pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, dan mendemonstrasikan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya finansial
- b. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi persyaratan kasnya.
- c. Menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan entitas untuk mendanai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya.
- d. Menyediakan informasi tentang kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan di dalamnya.
- e. Menyediakan informasi menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas atas hal biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Selain itu laporan keuangan juga dapat menyediakan informasi untuk:

- a. Mengindikasikan apakah sumber daya yang ada dapat digunakan secara legal sesuai dengan anggaran yang disahkan (*legally adopted budget*).
- b. Mengindikasikan apakah sumber daya yang ada dapat digunakan sesuai persyaratan legal dan kontraktual, termasuk kriteria keuangan yang telah ditetapkan otoritas legislatif (*appropriate*).¹³

¹³Indra Bastian, *Akuntansi Sektor...*, hal. 96

B. Laporan Keuangan Daerah

1. Pengertian Laporan Keuangan

Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan dan pengkomunikasikan informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundangundangan.¹⁴

2. Jenis Laporan Keuangan

Jenis laporan keuangan yang harus dibuat pemerintah daerah yaitu:

a. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajiban menjadi jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas bulan) setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari dua belas bulan.

¹⁴ Abdul Halim, *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2007), hal. 19

Neraca mencatumkan pos-pos diantaranya :

- 1) Kas dan setara kas
- 2) Investasi jangka pendek
- 3) Piutang pajak dan bukan pajak
- 4) Persediaan
- 5) Investasi jangka panjang
- 6) Aset tetap
- 7) Kewajiban jangka pendek
- 8) Kewajiban jangka panjang
- 9) Ekuitas dana¹⁵

b. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut :

- 1) Pendapatan
- 2) Belanja
- 3) Transfer/ defisit
- 4) Penerimaan pembiayaan
- 5) Pengeluaran pembiayaan
- 6) Pembiayaan neto
- 7) Sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/ SiKPA).¹⁶

¹⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010...hal. 245-246

¹⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010...hal. 268

Tujuan dari laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan informasi realisasi anggaran entitas pelaporan. Paradigma antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undang.¹⁷

c. Laporan Arus Kas

Tujuan pernyataan Standar Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan arus kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoritis selama satu periode akuntansi. Tujuan pelaporan laporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan, informasi ini disajikan untuk pertanggung jawaban dan pengambilan keputusan.¹⁸

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal sebagai berikut :

- 1) Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan atau keuangan dan pencapaian target perda APBD.

¹⁷Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi...*, hal. 215-216

¹⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010...hal. 288

- 2) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan, yang dimuat dalam ikhtisar pencapaian target kinerja APBD menurut urusan pemerintah daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik ataupun diagram.
- 3) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.¹⁹

3. Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Pemda dan DPRD). Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dipilih secara langsung dan demokratis. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) propinsi, kabupaten dan kota diberi kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan Kepala daerah sesuai UU no. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan, sama dan sejajar.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur

¹⁹Abdul Halim, *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah...*, hal.108

pelaksanaan urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah. Tata cara atau prosedur, persyaratan, kriteria pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pedoman yang ditetapkan pemerintah.²⁰

4. Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 timbul hak daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah, dan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan tersebut juga ditunjang dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah untuk lebih melengkapi sistem.

Pada dasarnya yang mendasari terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*goodgovernance*) yang memiliki tiga pilar utama yaitu: *transparansi*, *akuntabilitas*, dan *partisipatif*.²¹

²⁰Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi...*, hal. 216-217

²¹Indra Bastian, *Akuntansi Sektor...*, hal. 48

5. Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi sering dikelompokkan berdasarkan pemakai laporan keuangan yang dihasilkan, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi Keuangan adalah akuntansi yang ditujukan untuk menyediakan informasi keuangan bagi pihak entitas luar (eksternal), sedangkan Akuntansi Manajemen adalah akuntansi yang ditujukan untuk menyediakan informasi keuangan bagi pihak internal (manajemen). Dengan penggolongan tersebut, maka:

- 1) Akuntansi Keuangan Daerah merupakan bagian dari manajemen keuangan Daerah, sehingga termasuk akuntansi manajemen;
- 2) Secara terminologi, Akuntansi Keuangan Daerah termasuk Akuntansi Keuangan;
- 3) Secara yuridis, Akuntansi Keuangan Daerah berfungsi untuk menghasilkan laporan keuangan bagi pihak luar daerah, sehingga dapat disebut Akuntansi Keuangan (UU no. 32/2004, UU no. 17/2003, UU no. 1/2004);
- 4) Akuntansi Keuangan daerah menghasilkan informasi bagi pihak intern maupun ekstern Pemerintah Daerah, sehingga digolongkan sebagai Akuntansi Manajemen maupun Akuntansi Keuangan. Bagi pihak intern, akuntansi keuangan daerah digunakan sebagai pendukung penyusunan anggaran (APBD) dan sebagai alat analisis kinerja Pemerintah Daerah;
- 5) Saat ini Akuntansi Keuangan Daerah belum berkembang sebaik Akuntansi Sektor Swasta.²²

Akuntansi keuangan daerah adalah akuntansi yang dipakai oleh Pemerintahan Daerah, untuk melakukan manajemen dan pengelolaan keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengurus dan mengatur rumah tangga

²²Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi...*, hal. 247

pemerintah daerah. Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi.²³

C. Laporan Realisasi Anggaran

1. Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif dan berorientasi pada kepentingan publik.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Jika dibandingkan dengan neraca, LRA menduduki prioritas yang lebih penting, dan LRA ini merupakan jenis laporan keuangan daerah yang dahulu dihasilkan sebelum membuat laporan neraca dan laporan arus kas. Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung (*backbone*) penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama. Berdasarkan LRA tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja dan analisis pembiayaan.²⁴

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang

²³Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi...*, hal. 211

²⁴Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit & Percetakan YKPN, 2007), hal. 141

wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.²⁵

²⁵Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Edisi Terbaru: *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2013), hal. 267

2. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan dari laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Memberikan informasi realisasi anggaran entitas pelaporan. Paradigma antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undang.²⁶

D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Pengertian APBD

APBD merupakan suatu pertanggungjawaban rencana kerja Pemda dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik.²⁷

Berdasarkan pasal 64 ayat (2) UU. No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud. APBD menurut pasal 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.²⁸

²⁶Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi...*, hal. 215-216

²⁷Indra Bastian, *Akuntansi Sektor...*, hal. 189

²⁸Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi...*, hal. 220-221

2. Fungsi APBD

Berdasarkan pasal 18 UUD 1945 Amandemen IV, tujuan pembentukan Daerah Otonom adalah meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan untuk melayani masyarakat dan melaksanakan program pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan daerah otonom, menurut penjelasan pasal 64 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, fungsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah untuk:

- a. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada Rakyat Daerah yang bersangkutan.
- b. Mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
- c. Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab Pemerintah Daerah umumnya dan Kepala Daerah khususnya, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu menggambarkan seluruh kebijaksanaan Pemerintah daerah.
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap pemerintahan daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna.
- e. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada Kepala Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan Keuangan Daerah di dalam batas-batas tertentu.

Penyusunan APBD haruslah diletakkan dalam kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah yang mempertimbangkan skala prioritas pembangunan. Selanjutnya pelaksanaan APBD haruslah dikendalikan menurut sasaran-sasaran yang jelas dan terukur. Jadi, baik penyusunan maupun pelaksanaan APBD tidak dapat dipisahkan dengan proses pembangunan berjangka menengah dan berskala nasional.²⁹

²⁹Indra Bastian, *Akuntansi Sektor...*, hal. 48-49

3. Proses Penyusunan dan Penetapan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Daerah, terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Rancangan APBD berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan rencana kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun berjalan, kemudian dibahas bersama dengan Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya, dan bila kebijakan umum APBD telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).³⁰

Tahapan-tahapan penyusunan anggaran yang bersumber dari pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- a. Mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi, Biro Keuangan dan Biro Penyusunan Program, untuk mengetahui perkiraan penerimaan/pendapatan daerah untuk satu tahun yang akan datang.
- b. Mengadakan pertemuan dengan dinas-dinas Provinsi, biro-biro di Sekretariat Wilayah, kantor-kantor dan badan-badan lainnya, yang

³⁰Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi...*, hal. 62

- terkait dengan penyusunan anggaran pembangunan, untuk memberikan penjelasan penyusunan anggaran pembangunan.
- c. Meneliti dan membahas DUPDA bersama biro penyusunan Program Setwilda serta Biro Keuangan Setwilda serta instansi yang bersangkutan.
 - d. Mengadakan pertemuan antar bidang di Bappeda bersama ketua Bappeda Provinsi untuk penyaringan DUPDA yang didasarkan tersedianya dana anggaran pembangunan di tahun mendatang dan skala prioritas yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.
 - e. Disusun Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Tim Anggaran yang kemudian disampaikan ke DPRD untuk dibahas.
 - f. DPRD, RAPBD akan dibahas bersama-sama antara Tim Anggaran Eksekutif dan Tim Anggaran Legislatif.
 - g. Setelah dibahas dan mendapat persetujuan dari DPRD, maka RAPBD dapat disahkan menjadi APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).
 - h. Pelaksanaan APBD menunggu pengesahan dari pejabat yang berwenang.³¹

4. Klasifikasi APBD

Adapun struktur APBD berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 terdiri dari 3 bagian yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Penjelasan dari 3 bagian tersebut adalah:

a. Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pendapatan Daerah yaitu semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana

³¹Indra Bastian, *Akuntansi Sektor...*, hal. 190

lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- a. Pajak daerah.
- b. Retribusi daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Lain-lain PAD yang sah terdiri dari:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- 3) Jasa giro.
- 4) Pendapatan bunga.
- 5) Tuntutan ganti rugi.
- 6) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 7) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2. Dana perimbangan terdiri dari:

- 1) Dana Bagi Hasil
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU)
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

b. Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006, belanja daerah terdiri dari:

- a) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
- b) Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- c) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran atau sebagai alokasi surplus anggaran. Adanya pos

pembiayaan merupakan upaya agar APBD makin inovatif yaitu dapat memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah.

Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006, Pembiayaan Daerah terdiri dari:

- a) Penerimaan pembiayaan mencakup:
 1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)
 2. Pencairan dana cadangan
 3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 4. Penerimaan pinjaman daerah
 5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
 6. Penerimaan piutang daerah.
- b) Pengeluaran pembiayaan mencakup:
 1. Pembentukan dana cadangan
 2. Peneemaan modal (investasi) pemerintah daerah
 3. Pembayaran pokok utang
 4. Pemberian pinjaman daerah.

E. Pengukuran Kinerja Sektor Publik

1. Pengertian Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat ketercapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria tujuan-tujuan ini berupa target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan dan target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas, efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan), hasil kegiatan yang dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.³² Pengukuran kinerja juga merupakan bagian dari fungsi pengendalian manajemen karena pengukuran kinerja dapat digunakan untuk melakukan pengendalian aktivitas. Setiap aktivitas harus terukur kinerjanya agar dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Efisiensi dan efektifitas tersebut merupakan dasar untuk melakukan penilaian kinerja.³³

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*.³⁴ Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. Tolak ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja perangkat daerah. Satuan ukur merupakan tolak ukur yang dapat digunakan untuk melihat sampai

³²Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Pertama*,(Yogyakarta: BPFE,2013) hal. 25

³³Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015), hal. 60

³⁴Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2009), hal. 121

seberapa jauh unit kerja mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.³⁵

2. Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja

Tujuan sistem pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.
- b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pendapatan strategi.
- c. Untuk mengkomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*.
- d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.³⁶

3. Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Sektor publik tidak bisa lepas dari kepentingan umum sehingga pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi sektor publik tersebut dapat dicapai penyedia jasa dan barang-barang publik. Sementara dari perspektif internal organisasi, pengukuran kinerja juga sangat bermanfaat untuk membantu kegiatan manajerial keorganisasian. Berikut manfaat pengukuran kinerja baik untuk internal maupun eksternal organisasi sektor publik:

- a. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
- b. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.

³⁵Abdul Halim dan Muhammad Iqbal, *Pengelolaan Keuangan Daerah, Seri Bunga rampai manajemen keuangan daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2012), hal. 167-168

³⁶Ihyaul Ulum. *Audit Sektor Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 19-21

- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
- d. Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- f. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.
- i. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
- j. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.³⁷

F. Teknik Analisis Rasio Keuangan

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain: rasio kemandirian (otonomi fiskal), rasio efektifitas dan efisiensi, rasio aktivitas dan rasio efisiensi belanja:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angkaraasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.³⁸

³⁷Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja...*, hal. 33-34

³⁸Mahmudi, *Analisis Laporan...*, hal. 140-141

$$RasioKemandiria = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Propinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2016)

2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

a. Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$RasioEfektifitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2016)

b. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$RasioEfisiensi = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2016)

3. Rasio Aktivitas

a. Rasio belanja langsung terhadap total belanja³⁹

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan (aktivitas). Apabila realisasi belanja lebih kecil dari target yang telah dianggarkan berarti dapat dikatakan baik

³⁹Mahmudi, *Analisis Laporan...*, hal. 163-164

karena Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat menghemat belanja langsung, sedangkan apabila realisasi belanja langsung lebih besar dari target yang telah dianggarkan berarti tidak dapat dikatakan baik, karena Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak dapat menghemat belanja langsung.

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2016)

b. Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja

Belanja tidak langsung merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung. Apabila realisasi belanja tidak langsung lebih kecil dari target yang telah dianggarkan berarti dapat dikatakan baik karena Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat menghemat belanja tidak langsung, sedangkan apabila realisasi belanja tidak langsung lebih besar dari target yang telah dianggarkan berarti tidak dapat dikatakan baik, karena pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak dapat menghemat belanja tidak langsung.

$$\text{Rasio Belanja Tdk Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2016)

4. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%,

sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut:⁴⁰

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2016)

G. Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan Syafrini Ropita (2013) dengan judul analisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten Tanah Datar (studi kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset). Hasil penelitiannya adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dinilai baik secara garis besar walaupun mengalami perubahan yang berfluktuasi pada periode 2009-2011. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya tentang keuangan daerah yang didalamnya menghitung rasio kemandirian daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio efektifitas dan efisiensi pajak, derajat kontribusi BUMD serta analisis kinerja belanja, sedangkan peneliti hanya menganalisis rasio kemandirian daerah, rasio efektifitas dan efisiensi pendapatan, rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung dan rasio efisiensi belanja.⁴¹

Ayu Febriyanti Puspitasari (2011) yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun Anggaran 2007-2011. Penelitian ini menggunakan aspek rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas dan efisiensi, Rasio Belanja rutin dan Belanja Pembangunan terhadap Total Belanja, rasio pertumbuhan, dan aspek pembiayaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kota Malang dengan rasio kemandirian

⁴⁰Mahmudi, *Analisis Laporan...*, hal. 164

⁴¹Syafrini Ropita, *Analisis Kinerja Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupataen Tanah Datar (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keauangan dan Aset)*, (STAIN Batusangkar :Jurusan syariah programstudi Ekonomi syariah konsentrasi akuntansi syariah, 2013), hal.6

daerah rata-rata dalam lima tahun terakhir yaitu tahun 2007-2011 yang mencapai 15,36% mengintrepetasikan pola kemandirian yang masih instruktif. Pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Pola instruktif tersebut yang membuat ketergantungan pemerintah daerah kota Malang dari sisi financial terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Sedangkan menurut rasio efektifitas dan efisiensi pemerintahan kota malang telah efektif dan efisien dan dapat merealisasikan PADnya. Menurut analisis aspek pembiayaan pemerintah Malang analisis aspek pembiayaan APBD Kota Malang baik dari sisi penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dengan melihat tren pertumbuhanya.⁴² Perbedaan dengan penulis adalah waktu dan tempat penelitian dan rasio keungan yang digunakan. Dimana waktu dan tempat penelitian Ayu Febriyanti pada tahun 2007-2011 pada dinas pendapatan derah kota Malang.

H. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul ini, maka penulis akanmenjelaskan maksud dari judul tersebut yaitu:

1. Analisis

Analisis adalah alat yang digunakan dalam menjelaskan hubungan dari data keuangan yaitu dengan membandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Analisis rasio dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk melihat atau menganalisis tentang kesehatan dan kinerja keuangan.

2. Kinerja Keuangan Pemerintahan

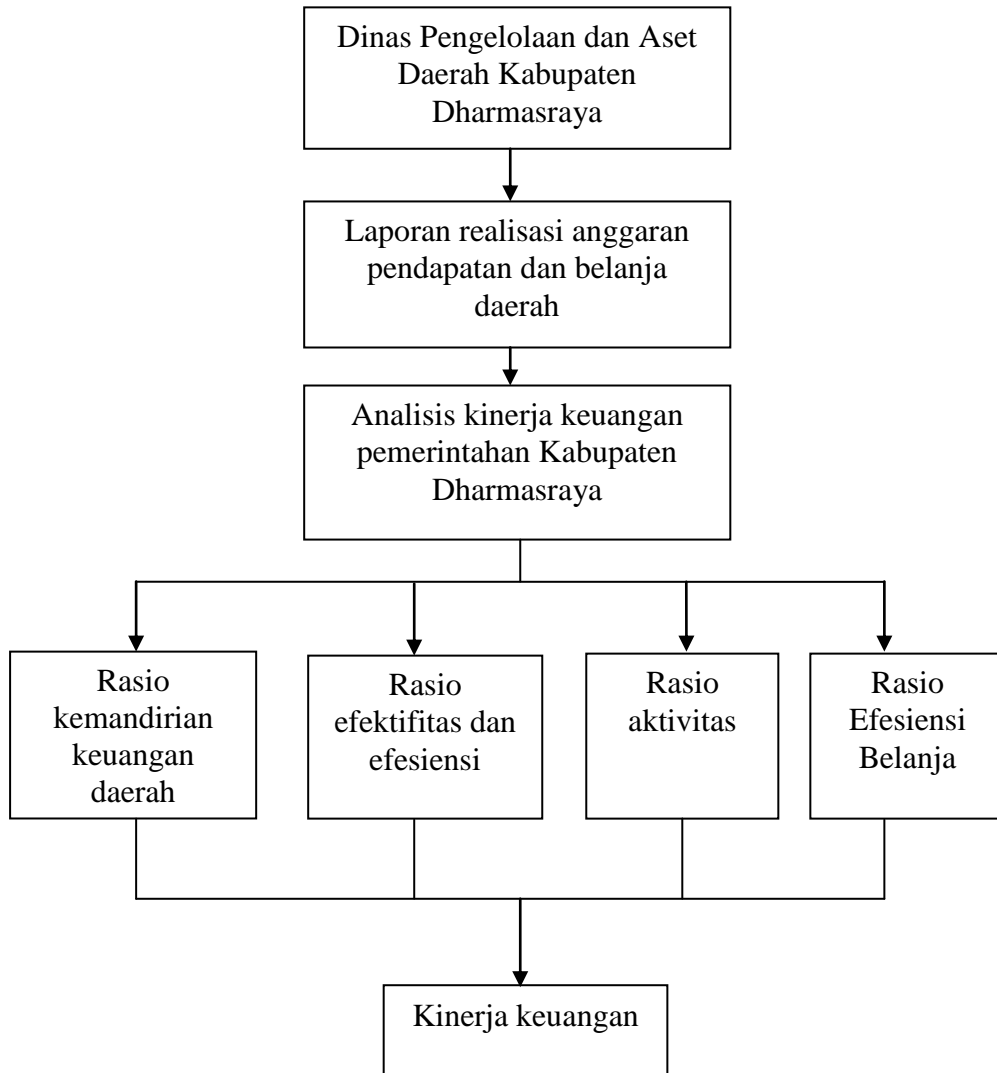
Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas

⁴²Ayu Febriyanti Puspitasari (2011) yang berjudul *Analisis Kinerja KeuanganPemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011*. (Skripsi Sarjana, JurusanManajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya,2011)

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan. Pada dasarnya pengertian kinerja dapat dimaknai secara beragam. Beberapa pakar memandangnya sebagai dasar dari suatu proses penyelesaian pekerjaan sementara sebagian yang lain memahaminya sebagai perilaku yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Penilaian kinerja merupakan proses yang dilakukan perusahaan dalam mengevaluasi kinerja pekerjaan seseorang.

Dalam pemerintahan hasil kinerja dapat diukur dalam melihat kinerja keuangannya dengan cara apakah tercapai atau tidak pembangunan di suatu pemerintahan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

I. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kuantitatif yaitu dengan mengelola data yang penulis dapatkan pada laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah untuk memberikan hasil analisis.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan Juni sampai dengan bulan November 2016 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan pengambilan data yang dilakukan pada DPPKAD.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek data dari mana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder (*secondary*) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh instansi terkait dan/atau pihak lain).⁴³ Data sekunder yang penulis perlukan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang penulis peroleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Dharmasraya.

⁴³Nur Asnawi, Masyihuri, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*, (Malang: UINMalikiPress, 2011), hal. 153

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari catatan dan dokumen-dokumen instansi baik dalam bentuk laporan maupun buku-buku petunjuk guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan dan pembahasan yang dilakukan. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.⁴⁴ Dalam penelitian ini, data yang penulis gunakan adalah data-data tertulis berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2015.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Rasio Keuangan
 - a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Propinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2016)

Setelah peneliti mendapatkan hasil dari rumus rasio dia atas maka peneliti akan mengukursesuai dengan tabel pengukuran berikut:

Tabel 3.1
Kemampuan keuangan, rasio kemandirian

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian
Rendah sekali	0%-25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%

Sumber: Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*⁴⁵

⁴⁴Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 141

⁴⁵Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: salemba empat, 2008), hal. 161

Semakin tinggi rasio ini maka semakin tinggi kemandirian pemerintahan daerah terhadap pemerintahan pusat dan atau pemerintahan provinsi.⁴⁶

b) Rasio Efektifitas Dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

1) Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan).

$$RasioEfektifitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2016)

Tabel 3.2
Rasio Efektifitas

Kriteria Efektifitas	Persentase Efektifitas
Sangat efektif	> 100%
Efektif	100%
Cukup efektif	90%-99%
Kurang efektif	75%-89%
Tidak efektif	< 75%

Sumber: Mahmudi, *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*⁴⁷

Rasio efektifitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Kemampuan memperoleh PAD dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100%.

⁴⁶Mahmudi, *Analisis Laporan...*, hal. 129

⁴⁷Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016), hal. 141

2) Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Biaya pemerolehan adalah semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang atau jasa dianggarkan dalam APBD.⁴⁸

$$RasioEfisiensi = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2016)

Setelah peneliti mendapatkan hasil dari rumus rasio di atas maka peneliti akan mengukur sesuai dengan tabel pengukuran berikut:

Tabel 3.3
Rasio Efisiensi

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
Sangat efisien	< 10%
Efisien	10%-20%
Cukup efisien	21%-30%
Kurang efisien	31%-40%
Tidak efisien	<40%

Sumber: Mahmudi, *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*⁴⁹

Pendapatan asli daerah dikategorikan efisiensi apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% semakin kecil rasio ini semakin baik.

⁴⁸Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 17 ayat (1) pasal 17 PP 58/2005

⁴⁹Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah...*, hal. 142

c) Rasio Aktifitas

1) Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja⁵⁰

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan (aktivitas). Apabila realisasi belanja lebih kecil dari target yang telah dianggarkan berarti dapat dikatakan baik karena Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat menghemat belanja langsung, sedangkan apabila realisasi belanja langsung lebih besar dari target yang telah dianggarkan berarti tidak dapat dikatakan baik, karena Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak dapat menghemat belanja langsung.

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2016)

2) Rasio Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja

Belanja tidak langsung merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung. Apabila realisasi belanja tidak langsung lebih kecil dari target yang telah dianggarkan berarti dapat dikatakan baik karena Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat menghemat belanja tidak langsung, sedangkan apabila realisasi belanja tidak langsung lebih besar dari target yang telah dianggarkan berarti tidak dapat dikatakan baik, karena pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak dapat menghemat belanja tidak langsung.

⁵⁰Mahmudi, *Analisis Laporan...*, hal. 151-152

$$\text{Rasio Belanja Tdk Langsung} = \frac{\text{Total Belanja tdk Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2016)

d) Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerinta daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2016)

2. Analisis Kinerja Melalui Rasio-Rasio Keuangan

Analisis kinerja pemerintahan dapat diketahui dari hasil rasio-rasio keuangan yaitu:

a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Setelah peneliti mendapatkan hasil dari rumus rasio dia atas maka peneliti akan mengkursesuai dengan tabel pengukuran berikut:

Tabel 3.4

Kemampuan keuangan, rasio kemandirian

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian
Rendah sekali	0%-25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%

Apabila rasio kemandirian menacapai 0%-25% maka kemampuan kinerja keuangannya rendah sekali, apabila 25%-50% maka kemampuan kinerjanya rendah, dan apabila kemampuan kinerjanya dikatakan sedang yaitu 50%-75%, sedangkan dikatakan tinggi yaitu yang bernilai 75%-100%.

b) Rasio Efektifitas Dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Tabel 3.5
Rasio Efektifitas

Kriteria Efektifitas	Persentase Efektifitas
Sangat efektif	> 100%
Efektif	100%
Cukup efektif	90%-99%
Kurang efektif	75%-89%
Tidak efektif	< 75%

Kinerja perusahaan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan asli daerah di kategorikan sangat efektif apabila rasio ini mencapai minimal >100%. Apabila mencapai 100% dikatakan efektif, dan dikatakn cukup efektif apabila persentasenya mencapai 90%-99%, apabila persentasenya 75%-89% dikategorikan kurang efektif, dan apabila dikatakan tidak efektif persenatasenya <75%.

Tabel 3.6
Rasio Efisiensi

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
Sangat efesien	< 10%
Efesien	10%-20%
Cukup efesien	21%-30%
Kurang efesien	31%-40%
Tidak efesien	<40%

Sedangkan kemampuan memperoleh PAD di kategorikan sangat efisiensi apabila rasio yang di capai kurang <10%, dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai 10%-20%, dikategorikan cukup efisien apabila persentase rasionya 21%-30%, dikatakan kurang efisien apabila rasi persenatasenya 31%-40%, dan apabila persentase rasionya <40% maka dikategorikan tidak efesie.

c) Rasio Aktivitas

1) Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja

Apabila realisasi belanja langsung lebih kecil dari target yang telah di anggarkan berarti dapat dikatakan kinerjanya baik, sedangkan apabila realisasi belanja langsung lebih besar dari target yang telah di anggarkan berarti tidak dapat dikatakan baik.

2) Rasio Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja

Apabila realisasi belanja tidak langsung lebih kecil dari target yang telah di anggarkan berarti dapat dikatakan baik, sedangkan apabila realisasi belanja tidak langsung lebih besar dari target yang telah di anggarkan berarti tidak dapat dikatakan baik.

d) Rasio Efisiensi Belanja

Apabila kinerja Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Instansi

a. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Dharmasraya

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) bertempat di Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 26 November 2010. Pembentukan Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ini adalah tindak lanjut dari peraturan Pemerintah 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

SKPD, DPPKAD merupakan perubahan bentuk dari SKPD sebelumnya yang Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang dibentuk dengan peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 tahun 2008 tanggal 19 mei 2008 yang sebelumnya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 tahun 2005. BPKD sendiri merupakan penyatuan bagian keuangan Sekretariat Daerah dengan Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Dharmasraya.

b. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Dharmasraya

1. Visi DPPKAD

Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Dharmasraya adalah “Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan taat melalui

manajemen yang baik”. Pengertian dari kata kunci dari visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Taat adalah pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Manajemen yang baik berkaitan dengan pencapaian tujuan pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan taat, terkandung makna optimalisasi Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan sistem manajemen yang ditetapkan bertumpu pada manajemen yang mengandung unsur POAC.

2. Misi DPPKAD

Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut:

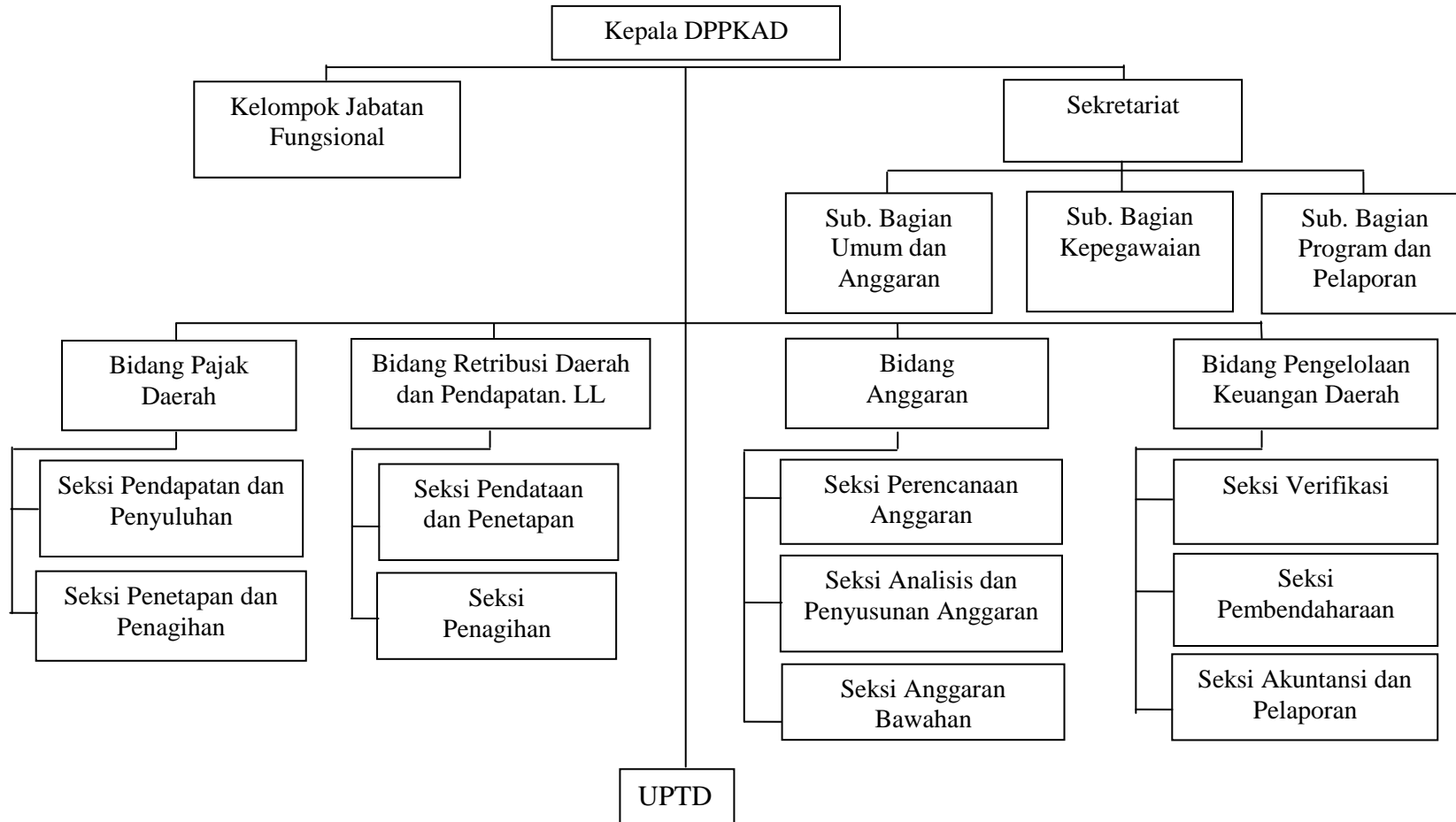
- a. Menciptakan aparatur pengelolaan keuangan daerah yang handal dan profesional.
- b. Mewujudkan sistem perencanaan penganggaran daerah yang berbasis masyarakat.
- c. Mewujudkan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah yang transparan dan tepat waktu.
- d. Meningkatkan pengelolaan retribusi daerah yang berbasis pelayanan masyarakat.
- e. Meningkatkan pengelolaan pajak daerah.
- f. Meningkatkan sistem administrasi, sarana prasana pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi.

c. Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Dharmasraya

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu bagan yang menunjukkan hubungan pada suatu organisasi atau perusahaan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam melaksanakan fungsi dan tugas-tugas yang dibebankan terhadap suatu posisi/jabatan tertentu untuk menjamin kelancaran kerjanya.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Dharmasraya



2. Uraian Tugas

a. Kepala Dinas

Kepala dinas melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Tugas kepala dinas antara lain:

- 1) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan.
- 2) Mengkoordinasikan pembuatan kebijakan di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah dengan instansi terkait.
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat dikepalai oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi perangkat daerah serta di lingkup dinas yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan serta urusan perencanaan dan program, pelayanan proses kepegawaian dinas, evaluasi pengendalian program dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, serta surat menyurat, kearsipan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- 2) Membantu kepala dinas mengkoordinasikan perumusan kebijakan pengelolaan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah bersama bidang lain-lain.

- 3) Pengelolaan sumber daya manusia, ketenagakerjaan dan sarana prasarana kantor.
- 4) Mengkoordinasikan penyusunan program, perencanaan dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas.
- 5) Pengelolaan administrasi keuangan daerah.
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- 1) Sub bagian umum dan anggaran
Sub bagian umum dan anggaran mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pemeliharaan barang inventaris dan asset, pengelolaan anggaran dinas.
- 2) Sub bagian kepegawaian
Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian, pembinaan kelembagaan serta ketatalaksanaan.
- 3) Sub bagian program dan pelaporan
Sub bagian program dan pelaporan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan penyusunan serta pelaporan pelaksanaan program.

c. Bidang Pajak Daerah

Kepala pajak daerah bertugas melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis di bidang pajak daerah dan memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pendapatan, pelayanan informasi dan penyuluhan pajak daerah.

- 2) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penetapan dan penagihan pajak daerah.
- 3) Mengkoordinasikan dan memadukan rencana program kegiatan bidang pajak daerah.
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain

Bidang retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui sekretaris. Fungsi bidang retribusi daerah dan pendapatan lain daerah yaitu:

- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
- 2) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan dan penetapan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
- 3) Mengkoordinasikan dan memadukan rencana program dan kegiatan bidang retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang retribusi daerah dan pendapatan lain-lain terdiri dari :

- 1) Seksi pendataan dan penetapan

Seksi pendataan dan penetapan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendataan dan penetapan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.

2) Seksi penagihan

Seksi penagihan bertugas membantu kepala bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penagihan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.

e. Bidang Anggaran

Bidang anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan dan penyusunan anggaran. Bidang anggaran mempunyai fungsi yaitu:

- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan dan perencanaan anggaran.
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran.
- 3) Pelaksanaan analisis dan perumusan kebijakan teknis penyusunan dokumen anggaran.
- 4) Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran bawahan.
- 5) Mengkoordinasikan dan memadukan rencana program dan kegiatan bidang anggaran.
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang anggaran terdiri dari:

1) Seksi Perencanaan Anggaran

Seksi perencanaan anggaran mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang perencanaan anggaran.

2) Seksi Analisis Dan Penyusunan Dokumen Anggaran

Seksi analisis dan penyusunan dokumen anggaran mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis analisis dan penyusunan dokumen anggaran.

3) Seksi Anggaran Bawahan

Seksi anggaran bawahan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan anggaran bawahan.

f. Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah

Bidang pengelolaan keuangan daerah dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan tanggung jawab kepala dinas melalui sekretaris. Kepala bidang pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah.
- 2) Melaksanakan verifikasi dan pembendaharaan.
- 3) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis akuntansi dan pelaporan keuangan.
- 4) Mengkoordinasikan dan memadukan rencana program dan kegiatan bidang pengelolaan keuangan daerah.
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

g. Sumber Daya Aparatur

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, DPPKAD didukung dengan aparatur oleh 58 (lima puluh delapan) orang personil yang terdiri dari 46 (empat puluh enam) orang Aparatur Sipil Negara (ASN). 6 (enam) orang Tenaga Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan 10 (sepuluh) orang Tenaga Lepas Harian (Tenaga K3 dan Penjaga Malam).

Dari 46 (empat puluh enam) ASN tersebut, rincian berdasarkan eselonering, golongan, dan latar belakang pendidikan masing-masing ASN tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Eselonering
 - a. Eselon II : 1 orang
 - b. Eselon III : 5 orang
 - c. Eselon IV : 12 orang
 - d. Staf : 28 orang
2. Berdasarkan Golongan
 - a. Golongan IV : 6 orang
 - b. Golongan III : 26 orang
 - c. Golongan II : 14 orang
3. Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
 - a. Srata 2 (S2) : 7 orang
 - b. Srata 1 (S1) : 23 orang
 - c. Diploma III : 5 orang
 - d. SMA : 10 orang

B. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya

Analisis untuk mengukur keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas dan efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio efisiensi belanja. Berikut hasil analisis laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2015:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berikut adalah hasil analisis rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2015 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran:

Sumber pendapatan dari pihak eksteren dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Sumber Pendapatan Asli Daerah
(Dalam Rupiah)

Keterangan	2015
Pendapatan Pajak daerah	10.643.026.951,00
Pendapatan Retribusi daerah	7.148.667.913,00
Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.793.094.913,00
Lain-lain PAD yang sah	34.109.549.429,00
Jumlah	56.694.339.206,00

Sumber: APBD Kabupaten Dharmasraya

Tabel 4.2
Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman
(Dalam Rupiah)

Keterangan	2015
Pendapatan Transfer	604.520.411.648,00
Transfer Pusat – lainnya	86.570.673.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	44.552.535.091,00
Jumlah	735.643.619.739,00

Sumber: APBD Kabupaten Dharmasraya

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Propinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Olahan data:

$$\begin{aligned}\text{Rasio Kemandirian} &= \frac{56.694.339.206,00}{735.643.619.739,00} \times 100\% \\ &= 0,077067669 \times 100\% \\ &= 7,70 \%\end{aligned}$$

Dari hasil rasio kemandirian tahun 2015 di atas menyatakan bahwa Pemerintahan Dharmasraya memiliki rasio kemandirian keuangan daerah mencapai 7,70% yang mana skala interval masih berada pada 0%-25% rasio ini masih dalam kriteria rendah sekali. Karena rasio yang rendah mengakibatkan kabupaten Dharmasraya dalam menjalankan pemerintahannya masih membutuhkan pendapatan dari pihak eksternal.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam kinerja keuangannya mencapai 7,70% yang kriteria intervalnya rendah sekali. Menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten Dharmasraya masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat atau provinsi. Untuk itu, perlunya usaha pemerintah daerah untuk dapat mengurangi ketergantungan atas sumber dana dari luar (Ekstern) dan meminta kewenangan yang bertanggung jawab untuk dapat mengelola sumber pendapatan lain yang sampai saat ini masih dikuasai pemerintah pusat atau provinsi. Kinerja Pemerintah daerah belum dapat mencakupi kebutuhan dalam melaksanakan tugas pemerintah, karena pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya masih ketergantungan pada pemerintah pusat.

2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi PAD

a. Rasio Efektifitas PAD

Berikut adalah hasil dari analisis rasio efisiensi keuangan daerah tahun 2015 berdasarkan laporan realisasi anggaran. Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Olahan data:

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efektifitas} &= \frac{56.694.339.206,00}{67.755.812.750,00} \times 100\% \\ &= 0,836745024 \times 100\% \\ &= 83,67\%\end{aligned}$$

Tabel 4.3
Perhitungan rasio efektifita PAD
(Dalam rupiah)

Tahun	2015
Realisasi Penerimaan PAD	56.694.339.206,00
Target penerimaan PAD	67.755.812.750,00
Selisih target dengan realisasi PAD	11.061.473.544,00
Rasio efektifitas PAD	83,67%
Keterangan	Kurang efektif

Sumber: data diolah LRA tahun 2015

Skala Pengukurannya:

Tabel 4.4
Rasio Efektifitas

Kriteria Efektifitas	Persentase Efektifitas
Sangat efektif	> 100%
Efektif	100%
Cukup efektif	90%-99%
Kurang efektif	75%-89%
Tidak efektif	< 75%

Dari hasil rasio efektifitas tahun 2015 di atas menyatakan bahwa Pemerintahan Dharmasraya memiliki rasio efektifitas sebesar 83,67% yang mana skala interval masih berada pada 75%-89% rasio ini masih dalam kriteria kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direalisasikan sebesar Rp 56.694.339.206 lebih kecil dari pada yang dianggarkan sebesar Rp 67.755.812.750 dengan selisih yaitu sebesar Rp 11.061.473.544.

Berdasarkan analisis di atas menunjukkan bahwa analisis kinerja pengelolaan anggaran pendapatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kurang efektif. Penyebabnya tidak tercapainya PAD Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2015 yaitu disebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang belum patuh dalam membayar pajak, sehingga pendapatan dari pihak masih kecil dan belum sesuai dengan target. Kemudian pengelolaan sumber daya alam Kabupaten Dharmasraya yang bersumber dari hasil tambang, pertanian dan perkebunan. Berupa kebun sawit, coklat, dan kebun karet masih belum dikelola dengan baik. Khususnya dalam bidang pertambangan emas masih banyak pertambangan ilegal sehingga pendapatan dari pajak pertambangan sedikit.

b. Rasio Efisiensi PAD

Berikut adalah hasil dari analisis rasio efisiensi keuangan daerah tahun 2015 berdasarkan laporan realisasi anggaran. Tabel yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah:

Tabel 4.5
Biaya Perolehan PAD
(Dalam Rupiah)

Tahun	Keterangan	Biaya
2015	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	440.102.358,00
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	902.651.200,00
	Jumlah	1.342.753.558,00

Sumber: data diolah Tahun 2015

Tabel 4.6
Pendapatan Asli Daerah
(Dalam Rupiah)

Tahun	Keterangan	Biaya
2015	Pendapatan Pajak Daerah	10.643.026.951,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	7.148.667.913,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.793.094.913,00
	Lain-lain PAD yang sah	34.109.549.429,00
	Jumlah	56.694.339.206,00

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Olahan data:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{1.342.753.558,00}{56.694.339.206,00} \times 100\% \\ &= 0.02368409 \times 100\% \\ &= 2,36\% \end{aligned}$$

Skala Pengukurannya:

Tabel 4.7
Rasio Efisiensi

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
Sangat efisien	< 10%
Efisien	10%-20%
Cukup efisien	21%-30%
Kurang efisien	31%-40%
Tidak efisien	<40%

Pada tahun 2015 rasio efisiensi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang mencapai 2,36% termasuk dalam kategori “sangat efisien” karena Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menghemat biaya untuk pemungutan PAD yang bersumber dari Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah. Hal ini menandakan bahwa efisiensi PAD Kabupaten Dharmasraya sudah sangat efisien karena biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh PAD lebih kecil dari realisasi penerimaan PAD. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya mencapai persentasi sebesar 2,36% yang kinerjanya sangat efisien.

3. Rasio Aktivitas

a. Rasio belanja langsung terhadap total belanja

Berikut adalah hasil dari analisis rasio belanja langsung tahun 2015 berdasarkan laporan realisasi anggaran. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah:

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.8
Belanja langsung Pemerintah Kab. Dharmasraya
(dalam rupiah)

Tahun	2015
Belanja pegawai	2.701.092.500,00
Belanja barang dan jasa	149.234.164.172,00
Belanja modal	284.824.823.640,00
Jumlah	436.769.080.312,00

Sumber: data yang diolah tahun 2015

Olahan data:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Langsung} &= \frac{436.769.080.312,00}{846.140.562.321,00} \times 100\% \\ &= 0,51618974 \times 100\% \\ &= 51,61\% \end{aligned}$$

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya di lihat dari belanja langsung pada tahun 2015, mencapai target sebesar 51,61% dari total belanja daerah, tidak mencapai proporsi 60%-90%. Kabupaten Dharmasraya menghemat belanja langsung yang bersumber dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal sebesar dari yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan untuk rasio belanja langsung kinerja Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya dapat dikatakan baik, karena melakukan pengendalian biaya dan pengendalian anggaran cukup dan dapat menghemat belanja langsung, hal ini disebabkan belanja langsung yang terealisasi lebih kecil dari yang di anggarkan. Dan dilihat dari rata-rata sebesar 51,61% hal ini menunjukkan untuk belanja daerah 51,61% di habiskan untuk belanja daerah yang diperuntukkan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.

b. Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja

Berikut adalah hasil dari analisis rasio belanja tidak langsung tahun 2015 berdasarkan laporan realisasi anggaran. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah:

$$\text{Rasio Belanja Tdk Langsung} = \frac{\text{Total Belanja tdk Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.9
Belanja tidak langsung
(dalam rupiah)

Tahun	2015
Belanja pegawai	346.394.144.128,00
Belanja hibah	13.919.246.000,00
Belanja bunga	-
Belanja bantuan keuangan	48.508.091.881,00
Belanja tidak terduga	550.000.000,00
Jumlah	409.371.482.009,00

Sumber: data yang diolah tahun 2015

Olahan data:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Tdk Langsung} &= \frac{409.371.482.009,00}{846.140.562.321,00} \times 100\% \\ &= 0,48381026 \times 100\% \\ &= 48,38\% \end{aligned}$$

Rasio belanja tidak langsung pemerintah kabupaten dharmasraya pada tahun 2015 mencapai target sebesar 48,38% dari total belanja daerah. Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya menghemat belanja tidak langsung yang bersumber dari belanja pegawai, belanja hibah, belanja bunga, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan untuk rasio belanja tidak langsung kinerja Pemerintahan Kabupaten

Dharmasraya dapat melakukan pengendalian biaya dan pengendalian anggaran dengan baik dengan rasio sebesar 48,38% karena pada tahun anggaran 2015 dapat menghemat belanja tidak langsung hal ini disebabkan belanja langsung yang terealisasi lebih kecil dari yang di anggarkan. Hasil kinerja keuangan untuk rasio belanja lebih di prioritaskan untuk belanja langsung yaitu sebesar 51,61% dan untuk belanja tidak langsung sebesar 48,38%. Hal ini disebabkan belanja langsung banyak menunjang kegiatan operasional pemerintahan.

4. Rasio Efisiensi Belanja

Berikut adalah hasil dari analisis rasio efisiensi belanja tahun 2015 berdasarkan laporan realisasi anggaran. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Olahan data:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi Belanja} &= \frac{752.811.152.229,00}{798.464.612.321,00} \times 100\% \\ &= 0,94282344 \times 100\% \\ &= 94,28\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas rasio efisiensi belanja dari realisasi belanja terhadap anggaran belanja pada tahun 2015 sebesar 94,28%. Dapat dilihat bahwa pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat dikatakan efisien dalam melakukan realisasi belanja yang dibuktikan dengan rasio efisiensi tahun 2015 berada dibawah 100% dengan mencapai persentase sebesar 94,28%. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat dikatakan baik.

Analisis kinerja Perhitungan rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang memakai perhitungan realisasi belanja dibagi dengan anggaran belanja, berarti pemerintah melakukan penghematan anggaran dari total anggaran yang dianggarkan itu juga berlaku untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi dengan hasil ini Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kembali mendapatkan SILPA surplus (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dari efisiensi belanja. SILPA surplus yang dihasilkan dari efisiensi belanja suatu daerah sangat baik yang nantinya dipakai untuk tahun berikutnya ataupun untuk pengembangan daerah.

Berdasarkan dari analisis diatas menunjukkan bahwa analisis kinerja pengelolaan anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2015 sudah baik, dikarenakan belanja yang relatif kecil ditambah dengan penghematan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sehingga mendapatkan SILPA surplus yang nantinya bisa digunakan untuk pembangunan daerah dan lain sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kinerja keuangan daerah yang penulis lakukan pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2015 maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian daerah persentasenya mencapai 7,70%, ini dapat dikategorikan rendah sekali.
2. Rasio efektifitas pendapatan asli daerah dengan persentase 83,67% dengan kategori kurang efektif. Sedangkan efisiensi pendapatan asli daerah dengan persentase mencapai 2,36% dengan kategori sangat efisien.
3. Rasio belanja langsung mencapai 51,61%, dan rasio belanja tidak langsung mencapai 48,38%, karena Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menghemat belanja langsung dan belanja tidak langsung dari target yang telah dianggarkan.
4. Rasio efesiensi belanja mencapai 94,28% secara umum dapat dikatakan baik, karena Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sudah efisien dalam melakukan realisasi belanja.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis memberikan saran yang bermanfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya yaitu:

1. Agar Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan berdasarkan kemandirian keuangan daerah, efektifitas, efisiensi, belanja langsung, belanja tidak langsung, dan rasio efesiensi belanja.
2. Setelah penulis melakukan penelitian tentang kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya semoga menjadi masukan serta

motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk bisa mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangannya.

3. Supaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat mempertahankan kinerjanya baik dari sisi finansial maupun non finansial.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Halim dan Muhammad Iqbal, 2012, *Pengelolaan Keuangan Daerah, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Departemen Agama RI, 2006, *Al- 'Aliyy, Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro
- Halim Abdul, 2007, *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Ihyaul Ulum, 2009, *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Indra Bastian, 2006, *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Irham Fahmi, 2013, *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta
- Juliansyah Noor, 2013, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mahmudi, 2007, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan, Sosial, dan Politik*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- _____, 2015, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- _____, 2016, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Mohamad Mahsun, 2013, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi 1*, Yogyakarta: BPFE
- Muindro Renyowijoyo, 2008, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Nur Asnawi Masyihuri, 2011, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*, Malang: UIN-Maliki Press
- Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), 2013, Edisi Terbaru: *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Bandung: Fokusindo Mandiri

Sujoko Efferin, 2012, *et al.*, *Metode Penelitian Akuntansi; Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Tengku Muhammad Hasbi ash-shiddieqy, 2011, *Tafsir An-Nur*, Jakarta: Cakrawala Publishing

2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2015 dan 2014

Uraian	Ref	Anggaran 2015 Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2015	%	Realisasi Tahun 2014
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	V.B.1.a.1	16.419.577.916,00	10.643.026.951,00	64,82	10.419.529.313,00
Pendapatan Retribusi Daerah	V.B.1.a.2	8.028.399.951,00	7.148.667.913,00	89,04	24.150.243.783,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.B.1.a.3	5.719.705.495,00	4.793.094.913,00	83,80	5.144.409.428,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	V.B.1.a.4	37.588.129.388,00	34.109.549.429,00	90,75	13.097.074.891,12
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		67.755.812.750,00	56.694.339.206,00	83,67	52.811.257.415,12
PENDAPATAN TRANSFER					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					
Bagi Hasil Pajak	V.B.1.b.1.a	19.015.778.000,00	15.607.561.018,00	82,08	17.807.814.736,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	V.B.1.b.1.b	11.294.071.830,00	8.298.264.630,00	73,47	9.939.610.734,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	V.B.1.b.1.c	477.807.496.000,00	477.807.496.000,00	100,00	445.128.175.659,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	V.B.1.b.1.d	102.807.090.000,00	102.807.090.000,00	100,00	70.880.630.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		610.924.435.830,00	604.520.411.648,00	98,95	543.756.231.129,00
Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat - Lainnya					
Dana Otonomi Khusus					
Dana Penyesuaian	V.B.1.b.2.b	86.570.673.000,00	86.570.673.000,00	100,00	53.281.259.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		86.570.673.000,00	86.570.673.000,00	100,00	53.281.259.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	V.B.1.b.3.a	38.211.158.000,00	39.477.535.051,00	103,31	29.600.639.012,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	V.B.1.b.3.b				

Uraian	Ref	Anggaran 2015 Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2015	%	Realisasi Tahun 2014
1	2	3	4	5	6
Bantuan Keuangan	V.B.1.b.3.c	-	5.075.000.000,00	100,00	-
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		38.211.158.000,00	44.552.535.091,00	116,60	29.600.639.012,00
Jumlah Pendapatan Transfer		735.706.266.830,00	735.643.619.739,00	99,99	626.638.129.141,00
AJIN-LAIN PENDAPATAN YANG LAIN					
Pendapatan Hibah	V.B.1.c.1	8.222.557.400,00	2.088.016.102,00	25,39	3.449.929.943,00
Pendapatan Lainnya	V.B.1.c.2	-	-	-	4.380.000.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah		8.222.557.400,00	2.088.016.102,00	25,39	7.829.929.943,00
UMLAH PENDAPATAN		811.684.636.980,00	794.425.975.047,00	97,87	687.279.316.499,12
BELANJA DAERAH					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	V.B.2.a.1	349.090.736.628,00	333.129.415.085,00	95,43	328.916.848.333,00
Belanja Barang dan Jasa	V.B.2.a.2	149.170.548.172,00	139.847.017.469,00	93,75	109.747.275.954,00
Belanja Bunga	V.B.2.a.3	-	-	-	-
Belanja Subsidi		-	-	-	-
Belanja Hibah	V.B.2.a.4	31.567.883.442,00	31.076.293.859,00	98,44	28.121.032.781,00
Belanja Bantuan Sosial	V.B.2.a.5	-	-	-	1.559.300.000,00
Belanja bantuan keuangan	V.B.2.a.6	832.141.881,00	770.472.946,00	92,59	499.999.996,00
Jumlah Belanja Operasi		530.661.310.123,00	504.823.199.359,00	95,13	468.844.457.064,00
BELANJA MODAL					
Panah		-	-	-	3.265.229.340,00
Peralatan dan mesin	V.B.2.b.1	25.452.470.202,00	22.772.682.525,10	89,47	14.584.142.613,00
Bangunan dan bangunan	V.B.2.b.2	50.578.292.901,00	48.460.041.887,00	95,83	76.271.570.691,00
Jalan, irigasi dan jaringan	V.B.2.b.3	190.546.279.095,00	175.566.208.982,00	92,14	88.333.531.433,00
Aset Tetap lainnya	V.B.2.b.4	676.260.000,00	631.742.058,00	93,42	964.277.675,00
Jumlah Belanja Modal		267.253.302.198,00	247.439.575.452,10	92,59	183.618.751.742,00
BELANJA TIDAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga	V.B.2.c	550.000.000,00	548.377.418,00	99,70	7.451.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga		550.000.000,00	548.377.418,00	99,70	7.451.000,00
JUMLAH BELANJA		798.464.612.321,00	752.811.152.229,10	94,28	652.470.659.806,00

Uraian	Ref	Anggaran 2015 Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2015	%	Realisasi Tahun 2014
1	2	3	4	5	6
TRANSFER					
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN					
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		-	-	-	-
Transfer Bagi Hasil Pendapatan lainnya		-	-	-	-
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan		-	-	-	-
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	V.B.3	47.675.950.000,00	47.645.522.000,00	99,94	28.845.949.500
Transfer Bantuan Keuangan lainnya		-	-	-	-
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		47.675.950.000,00	47.645.522.000,00	99,94	28.845.949.500,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		846.140.562.321,00	800.456.674.229,10	94,60	681.316.609.306,00
SURPLUS/(DEFISIT)	V.B.4	(34.455.925.341,00)	(6.030.699.182,10)	17,50	5.962.707.193,12
PEMBIAYAAN	V.B.5				
PENERIMAAN DAERAH	V.B.5.a				
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	V.B.5.a.1	34.455.925.341,00	34.455.925.341,33	100,00	28.493.218.148
Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-
Penerimaan piutang daerah		-	-	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		34.455.925.341,00	34.455.925.341,33	100,00	28.493.218.148,21
ENGELUARAN DAERAH					
Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		-	-	-	-
Pembayaran Pokok Utang		-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		-	-	-	-

Uraian	Ref	Anggaran 2015 Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2015	%	Realisasi Tahun 2014
1	2	3	4	5	6
PEMBIAYAAN NETTO		34.455.925.341,00	34.455.925.341,33	100,00	28.493.218.148,21
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) SEBELUM KOREKSI		-	28.425.226.159,23		34.455.925.341,33
KOREKSI SILPA			(2.233.068.456,00)		-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) SETELAH KOREKSI		-	26.192.157.703,23		34.455.925.341,33

atatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



BUPATI DHARMASRAYA

[Handwritten signature]

LUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

Halaman 1-5

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN	764.790.237.150,00	811.684.636.980,00	46.894.399.830,00	6,13
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	66.455.812.750,00	67.755.812.750,00	1.300.000.000,00	1,96
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	17.395.000.000,00	16.419.577.916,00	(975.422.084,00)	(5,61)
4.1.1.01.	Pajak Hotel	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00
4.1.1.02.	Pajak Restoran	1.250.000.000,00	1.300.000.000,00	50.000.000,00	4,00
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00
4.1.1.04.	Pajak Reklame	85.000.000,00	95.000.000,00	10.000.000,00	11,76
4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	6.700.000.000,00	6.700.000.000,00		
4.1.1.07.	Pajak Parkir	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00
4.1.1.08.	Pajak Air Tanah	50.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	40,00
4.1.1.09.	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	200,00
4.1.1.12.	Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	4.500.000.000,00	3.624.577.916,00	(875.422.084,00)	(19,45)
4.1.1.13.	Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00		
4.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.425.000.000,00	2.060.000.000,00	(365.000.000,00)	(15,05)
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	6.308.012.000,00	8.028.399.951,00	1.720.387.951,00	27,27
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	881.000.000,00	3.413.818.589,00	2.532.818.589,00	287,49
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	4.328.262.000,00	3.465.831.362,00	(862.430.638,00)	(19,93)
4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.098.750.000,00	1.148.750.000,00	50.000.000,00	4,55
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.477.943.000,00	5.719.705.495,00	(1.758.237.505,00)	(23,51)
4.1.3.01.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik daerah/BUMD	7.477.943.000,00	5.719.705.495,00	(1.758.237.505,00)	(23,51)
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	35.274.857.750,00	37.588.129.388,00	2.313.271.638,00	6,56
4.1.4.02.	Jasa Giro	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00		
4.1.4.03.	Pendapatan Bunga Deposito	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00		
4.1.4.04.	Pendapatan Bunga		25.000.000,00	25.000.000,00	
4.1.4.05.	Pendapatan BLUD	19.375.938.000,00	18.867.568.000,00	(508.370.000,00)	(2,62)
4.1.4.06.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		150.000.000,00	150.000.000,00	
4.1.4.07.	Pendapatan Denda Pajak 1)	620.000.000,00	2.200.000.000,00	1.580.000.000,00	254,84
4.1.4.14.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	25.000.000,00		(25.000.000,00)	(100,00)

1	2	3	4	5	6
4.1.4.16.	Dana Kapitasi	7.753.919.750,00	8.645.561.388,00	891.641.638,00	11,58
4.1.4.18.	Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		
4.1.4.20.	Pengelolaan Air Minum		200.000.000,00	200.000.000,00	
4.2.	DANA PERIMBANGAN	571.367.391.000,00	610.924.435.830,00	39.557.044.830,00	6,92
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27.718.025.000,00	30.309.849.830,00	2.591.824.830,00	9,35
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	19.113.660.000,00	19.015.778.000,00	(97.882.000,00)	(0,51)
4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	8.604.365.000,00	11.294.071.830,00	2.689.706.830,00	31,26
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	477.807.496.000,00	477.807.496.000,00		
4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	477.807.496.000,00	477.807.496.000,00		
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	65.841.870.000,00	102.807.090.000,00	36.965.220.000,00	56,14
4.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus (DAK).	65.841.870.000,00	102.807.090.000,00	36.965.220.000,00	56,14
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	126.967.033.400,00	133.004.388.400,00	6.037.355.000,00	4,76
4.3.1.	Pendapatan Hibah	8.222.557.400,00	8.222.557.400,00		
4.3.1.03.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	8.222.557.400,00	8.222.557.400,00		
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)	38.211.158.000,00	38.211.158.000,00		
4.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	38.211.158.000,00	38.211.158.000,00		
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	80.533.318.000,00	86.570.673.000,00	6.037.355.000,00	7,50
4.3.4.01.	Dana Penyesuaian	80.533.318.000,00	86.570.673.000,00	6.037.355.000,00	7,50
	JUMLAH PENDAPATAN	764.790.237.150,00	811.684.636.980,00	46.894.399.830,00	6,13
5.	BELANJA	773.759.166.543,00	846.140.562.321,00	72.381.395.778,00	9,35
9.	BEBAN	773.759.166.543,00	846.140.562.321,00	72.381.395.778,00	9,35
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	384.651.416.594,00	409.371.482.009,00	24.720.065.415,00	6,43
5.1.1.	Belanja Pegawai	326.686.594.713,00	346.394.144.128,00	19.707.549.415,00	6,03
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	202.888.291.911,00	225.765.156.490,00	22.876.864.579,00	11,28
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	120.573.851.602,00	117.336.913.480,00	(3.236.938.122,00)	(2,68)
5.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.761.600.000,00	1.715.471.000,00	(46.129.000,00)	(2,62)
5.1.1.04.	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	142.000.000,00	233.849.600,00	91.849.600,00	64,68
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	418.200.000,00	440.102.358,00	21.902.358,00	5,24
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	902.651.200,00	902.651.200,00		
5.1.4.	Belanja Hibah	14.375.000.000,00	13.919.246.000,00	(455.754.000,00)	(3,17)
5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	14.375.000.000,00	13.919.246.000,00	(455.754.000,00)	(3,17)
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	42.289.821.881,00	48.508.091.881,00	6.218.270.000,00	14,70
5.1.7.03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	41.457.680.000,00	47.675.950.000,00	6.218.270.000,00	15,00
5.1.7.04.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	832.141.881,00	832.141.881,00		
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.300.000.000,00	550.000.000,00	(750.000.000,00)	(57,69)
5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga	1.300.000.000,00	550.000.000,00	(750.000.000,00)	(57,69)

1	2	3	4	5	6
5.2.	BELANJA LANGSUNG	389.107.749.949,00	436.769.080.312,00	47.661.330.363,00	12,25
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.267.506.500,00	2.701.092.500,00	(566.414.000,00)	(17,33)
5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.263.035.000,00	1.693.000.000,00	(570.035.000,00)	(25,19)
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	254.650.000,00	249.100.000,00	(5.550.000,00)	(2,18)
5.2.1.03.	Uang Lembur	641.671.500,00	688.692.500,00	47.021.000,00	7,33
5.2.1.05.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	108.150.000,00	70.300.000,00	(37.850.000,00)	(35,00)
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	154.856.159.919,00	149.243.164.172,00	(5.612.995.747,00)	(3,62)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.997.999.832,00	7.876.128.754,00	(121.871.078,00)	(1,52)
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.129.905.500,00	5.427.842.450,00	(702.063.050,00)	(11,45)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	57.713.211.388,00	51.980.585.771,00	(5.732.625.617,00)	(9,93)
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	5.716.042.280,00	5.589.226.040,00	(126.816.240,00)	(2,22)
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.705.041.257,00	6.369.242.000,00	(335.799.257,00)	(5,01)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.615.018.687,00	3.600.227.929,00	(14.790.758,00)	(0,41)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.463.955.000,00	1.268.469.000,00	(195.486.000,00)	(13,35)
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	206.550.000,00	127.225.000,00	(79.325.000,00)	(38,40)
5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	10.500.000,00	7.500.000,00	(3.000.000,00)	(28,57)
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	844.250.000,00	1.069.215.000,00	224.965.000,00	26,65
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.017.449.625,00	7.051.078.999,00	(966.370.626,00)	(12,05)
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	420.330.000,00	432.830.000,00	12.500.000,00	2,97
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	199.730.000,00	180.830.000,00	(18.900.000,00)	(9,46)
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	660.695.000,00	628.395.000,00	(32.300.000,00)	(4,89)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.034.885.000,00	28.458.046.361,00	4.423.161.361,00	18,40
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	347.702.600,00	322.480.000,00	(25.222.600,00)	(7,25)
5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	1.245.356.500,00	1.126.455.500,00	(118.901.000,00)	(9,55)
5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.617.028.000,00	1.621.815.000,00	4.787.000,00	0,30
5.2.2.23.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	103.500.000,00	92.500.000,00	(11.000.000,00)	(10,63)
5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.548.094.250,00	1.536.155.500,00	(1.011.938.750,00)	(39,71)
5.2.2.25.	Jasa/Upah	21.392.983.000,00	20.248.982.000,00	(1.144.001.000,00)	(5,35)
5.2.2.26.	Belanja Perawatan Peralatan kantor	228.600.000,00	220.600.000,00	(8.000.000,00)	(3,50)
5.2.2.28.	Uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga	3.270.832.000,00	3.641.708.868,00	370.876.868,00	11,34
5.2.2.30.	Honorarium Pelaksana / Panitia Kegiatan	366.500.000,00	361.125.000,00	(5.375.000,00)	(1,47)
5.2.2.31.	Belanja Peralatan Survey		4.500.000,00	4.500.000,00	
5.2.3.	BELANJA MODAL	230.984.083.530,00	284.824.823.640,00	53.840.740.110,00	23,31
5.2.3.02.	Belanja modal Pengadaan Tanah Pertanian	1.625.809.343,00	3.539.505.943,00	1.913.696.600,00	117,71
5.2.3.06.	Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan	132.000.000,00	66.000.000,00	(66.000.000,00)	(50,00)
5.2.3.14.	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	2.778.960.000,00	2.788.960.000,00	10.000.000,00	0,36
5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	838.300.000,00	126.728.700,00	(711.571.300,00)	(84,88)

1	2	3	4	5	6
5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.177.500.000,00	1.078.345.000,00	(99.155.000,00)	(8,42)
5.2.3.18.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	865.000.000,00	665.000.000,00	(200.000.000,00)	(23,12)
5.2.3.20.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	112.825.500,00	112.825.500,00		
5.2.3.22.	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	227.000.000,00	224.395.000,00	(2.605.000,00)	(1,15)
5.2.3.23.	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	146.664.000,00	146.664.000,00		
5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	10.000.000,00	10.000.000,00		
5.2.3.25.	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	138.050.000,00	138.050.000,00		
5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	406.633.168,00	390.164.168,00	(16.469.000,00)	(4,05)
5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	1.231.970.000,00	1.245.455.000,00	13.485.000,00	1,09
5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.766.753.750,00	2.403.950.750,00	637.197.000,00	36,07
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	1.489.443.225,00	2.506.017.250,00	1.016.574.025,00	68,25
5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.950.385.000,00	1.906.530.000,00	(43.855.000,00)	(2,25)
5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	696.930.000,00	812.480.000,00	115.550.000,00	16,58
5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	27.000.000,00	27.750.000,00	750.000,00	2,78
5.2.3.33.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar	770.000.000,00		(770.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.34.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	1.971.293.000,00	1.971.293.000,00		
5.2.3.36.	Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	40.000.000,00	11.000.000,00	(29.000.000,00)	(72,50)
5.2.3.37.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	4.494.119.000,00	4.388.933.000,00	(105.186.000,00)	(2,34)
5.2.3.40.	Belanja modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	700.000,00		(700.000,00)	(100,00)
5.2.3.48.	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	14.000.000,00	14.000.000,00		
5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	45.681.371.314,00	51.910.567.901,00	6.229.196.587,00	13,64
5.2.3.58.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	492.653.834,00	492.653.834,00		
5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	92.302.215.320,00	132.624.478.895,00	40.322.263.575,00	43,69
5.2.3.61.	Belanja modal Pengadaan Jembatan	19.609.406.550,00	19.044.810.550,00	(564.596.000,00)	(2,88)
5.2.3.62.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	12.678.201.800,00	19.399.806.999,00	6.721.605.199,00	53,02
5.2.3.63.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	200.000.000,00	200.000.000,00		
5.2.3.65.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.694.573.000,00	3.034.609.000,00	(659.964.000,00)	(17,86)
5.2.3.67.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	4.664.085.300,00	4.664.085.300,00		
5.2.3.68.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	6.964.668.500,00	10.114.968.700,00	3.150.300.200,00	45,23
5.2.3.70.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	25.000.000,00	25.000.000,00		
5.2.3.71.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	20.000.000,00	20.000.000,00		
5.2.3.72.	Belanja modal Pengadaan Instalasi dan Peralatan Pengolahan Sampah	233.750.000,00	233.100.000,00	(650.000,00)	(0,28)
5.2.3.74.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	2.245.260.100,00	2.340.100.100,00	94.840.000,00	4,22
5.2.3.75.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	1.494.210.000,00	1.479.210.000,00	(15.000.000,00)	(1,00)
5.2.3.79.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum	367.980.000,00	265.661.000,00	(102.319.000,00)	(27,81)

1	2	3	4	5	6
5.2.3.80.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	1.896.947.000,00	2.025.853.900,00	128.106.900,00	6,75
5.2.3.82.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Gas	7.779.952.000,00	6.206.540.150,00	(1.573.411.850,00)	(20,22)
5.2.3.83.	Belanja modal Pengadaan Buku	2.143.917.826,00	440.260.000,00	(1.703.657.826,00)	(79,46)
5.2.3.84.	Belanja modal Pengadaan Terbitan	23.500.000,00	23.500.000,00		
5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	12.500.000,00	12.500.000,00		
5.2.3.88.	Belanja modal Pengadaan Hewan	80.000.000,00	80.000.000,00		
5.2.3.89.	Belanja modal Pengadaan Tanaman	120.000.000,00	120.000.000,00		
5.2.3.91.	Belanja Modal Pembangunan Konstruksi Pengolahan Limbah	1.402.960.000,00	920.000.000,00	(482.960.000,00)	(34,42)
5.2.3.92.	Belanja Modal Pembangunan Pagar	3.609.595.000,00	4.318.870.000,00	709.275.000,00	19,65
5.2.3.93.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Tiang	40.000.000,00	40.000.000,00		
5.2.3.94.	Belanja Modal Rehabilitasi Gedung/Ruangan	125.000.000,00	125.000.000,00		
5.2.3.95.	Belanja Modal Pengadaan alat Berat	165.000.000,00	90.000.000,00	(75.000.000,00)	(45,45)
	JUMLAH BELANJA	773.759.166.543,00	846.140.562.321,00	72.381.395.778,00	9,35
	SURPLUS(DEFISIT)	(8.968.929.393,00)	(34.455.925.341,00)	(25.486.995.948,00)	284,17
6.	PEMBIAYAAN	8.968.929.393,00	34.455.925.341,00	25.486.995.948,00	284,17
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	8.968.929.393,00	34.455.925.341,00	25.486.995.948,00	284,17
6.1.1.	Penggunaan SILPA	8.968.929.393,00	34.455.925.341,00	25.486.995.948,00	284,17
6.1.1.01.	Penggunaan SILPA tahun sebelumnya	8.968.929.393,00	34.455.925.341,00	25.486.995.948,00	284,17
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	8.968.929.393,00	34.455.925.341,00	25.486.995.948,00	284,17
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	PEMBIAYAAN NETO	8.968.929.393,00	34.455.925.341,00	25.486.995.948,00	284,17
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)				

Pulau Pinjung, 2 Oktober 2015
Pj. BUPATI DHARMASRAYA

H. SYAFRIZAL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl. Sudirman No.137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213, Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : data.p3m@gmail.com

28 November 2016

Nomor : B-099.C /In.27/L.I/TL.00/ 11 /2016
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : **Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian**

Yth. Bupati Dharmasraya
Up. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Dharmasraya
Dharmasraya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : Novrianti / 12231056
Tempat/Tanggal Lahir : Sitiung, 08 November 1993
Nomor Induk Keluarga : KTP. 1310044811930002
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Alamat : Jorong Sitiung Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya

akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian : **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015**
Lokasi : Kantor DPPKAD Dharmasraya
Waktu : 29 November 2016 s.d 29 Januari 2017
Dosen Pembimbing 1 : Nasfizar Guspendri, SE., M.Si.
Dosen Pembimbing 2 : Sri Adella Fitri, SE., M.Si.

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan surat izin penelitian dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terimakasih.

an. Ketua
Kepala Pusat Penelitian dan
Penerbitan

Ika Meliza Maris, M. Si.
NIP. 198205142006042003

Tembusan:
1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Lintas Sumatera Km. 5 SeiDareh 27573 ☎ (0754) 40153 Fax. (0754) 40153
email:kesbangpoldharmasraya@yahoo.com

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR: 070/ 13 /Kesbangpol/I-2017

- A. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penertiban Rekomendasi Penelitian;
- B. Menimbang : a. Surat dari Ketua Institut Agama Islam Negeri Batusangkar Nomor: B-099.c/In.27/L.I/TL.00/11/2016 tanggal 28 November 2016 perihal Penerbitan Surat Izin Penelitian;
b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan pengambilan data perlu diterbitkan Surat Rekomendasi Pengambilan Data;
c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan huruf b, serta Hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya, berkas Persyaratan Administrasi Surat Rekomendasi Pengambilan Data telah memenuhi syarat.

Kantor Kesbangpol Kabupaten Dharmasraya, memberikan Surat Rekomendasi Penelitian kepada:

- a. Nama : **NOVRIANTI**
b. Tempat/Tgl lahir : Sitiung . 08-11-1993
c. Alamat : Jorong Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya
d. BP : 12231056
e. Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
f. Judul Penelitian : **" Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015"**
g. Waktu Penelitian : 29 November s/d 28 Februari 2017
Untuk : Melaksanakan Penelitian Di : Kantor DPPKD Dharmasraya.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari Kerangka serta Tujuannya.
2. Memberitahukan Kedatangan serta maksud tujuan yang akan dilaksanakan dengan menunjukan surat-surat Keterangan yang berhubungan dengan Pengambilan Data, baik kepada daerah setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/lokasi pengambilan data.
3. Mematuhi segala Peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Dharmasraya (sebagai laporan) di Pulau Punjung;
2. Ketua IAIN Batusangkar di Batusangkar;
3. Yang bersangkutan;



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

BADAN KEUANGAN DAERAH

Alamat : Jln. Lintas Sumatera Km.2 Pulau Punjung
Telepon (0754) 40161 Fax. (0754) 40161

Nomor : 800/35/BKD - 2017

Pulau Punjung, 20 Januari 2017

Lampiran : -

Kepada :

Perihal : Rekomendasi Penelitian

Sdr. Ketua Institut Agama
Islam Negeri Batu
Sangkar

di

Batusangkar

Dengan Hormat

Menindaklanjuti surat Nomor :070/13/Kesbangpol/1-2017 tanggal 16 Januari Perihal Rekomendasi Penelitian A.n Novrianti Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Batusangkar jurusan Ekonomi Syariah.

Maka bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan memberikan Rekomendasi pengambilan Data di Badan Keuangan Daerah.

Demikian disampaikan, diucapkan terima kasih.

A.n KEPALA BADAN,
ASUBAG KEPEGAWAIAN
BADAN
KEUANGAN DAERAH
SESRA JUNITA, SE, MM
Penata/ III.c
NIP.19790626 200801 2 028